KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : http//www.pertanian.go.id

Nomor : B- 266 /OT.240/A2/01/2024 17 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian

Yth.
Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan lingkup Kementerian Pertanian
di Jakarta

Menindaklanjuti hasil evaluasi jabatan ASN lingkup Kementerian Pertanian yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN RB, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menteri Pertanian telah menetapkan nama dan kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/KP.010/M/01/2024 tentang Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian (terlampir);
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/Kp.010/M/05/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
3. Setiap perubahan nama dan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini dilakukan melalui proses rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian

Indria Fitriani, SH., M.AP.
NIP. 197211061999032002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/KPTS/KP.010/M/01/2024
TENTANG
NAMA DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan, serta perubahan lingkungan strategis di Kementerian Pertanian, perlu mengatur kembali nama, dan kelas jabatan berdasarkan evaluasi jabatan di lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau dan menetapkan kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/Kp.010/M/05/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 365) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1141);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1084/M.SM.02.00/2023 tanggal 6 Oktober 2023 hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Guru Besar di Lingkungan Kementerian Pertanian;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor B/1364/M.SM.02.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG NAMA DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian merupakan pedoman atau acuan bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian dalam menetapkan pemangku jabatan pada unit kerjanya, setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

KETIGA : Bagi Pejabat Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III, diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan sebelumnya, namun wajib memenuhi syarat jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas diterbitkan.

KEEMPAT : Perubahan kelas jabatan:

a) Jabatan Fungsional Pamong Budaya berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2023;
b) Jabatan Fungsional Guru Besar berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023;
c) Tenaga Ahli Menteri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Menteri.

KELIMA : Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Karantina Pertanian berlaku sampai dengan beralihnya status kepegawaian Aparatur Sipil Negara Badan Karantina Pertanian menjadi Aparatur Sipil Negara Badan Karantina Indonesia.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/Kp.010/M/05/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/KPTS/KP.010/M/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : NAMA DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

NAMA DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
A.	**SEKRETARIAT JENDERAL**		
1	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal (Setjen)	17
2	Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Bio Industri	Setjen	16
3	Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional	Setjen	16
4	Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian	Setjen	16
5	Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian	Setjen	16
6	Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian	Setjen	16
7	Staf Khusus Menteri Pertanian	Setjen	16
8	Tenaga Ahli Menteri	Setjen	14
A.1.	BIRO PERENCANAAN		
1	Kepala Biro Perencanaan	Setjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	Biro Perencanaan, Setjen	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
A.2.	BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN		
1	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Setjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	Biro Organisasi dan Kepegawaian, Setjen	9
A.3.	BIRO HUKUM		
1	Kepala Biro Hukum	Setjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	Biro Hukum, Setjen	9
A.4.	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA		
1	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Setjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Setjen	9
A.5.	BIRO UMUM DAN PENGADAAN		
1	Kepala Biro Umum dan Pengadaan	Setjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	Biro Umum dan Pengadaan, Setjen	9
A.6.	BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI		
1	Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri	Setjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	Biro Kerja Sama Luar Negeri, Setjen	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
A.7.	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK		
1	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Setjen	15
2	Kepala Bagian Protokol	Biro Hukum dan Informasi Publik, Setjen	12
3	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	Biro Hukum dan Informasi Publik, Setjen	9
A.8.	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN		
1	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	Setjen	15
2	Kepala Bagian Umum	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Setjen	12
A.9.	PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN		
1	Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Setjen	15
2	Kepala Bagian Umum	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Setjen	12
A.10.	PUSAT PEPUSTAKAAN DAN LITERASI PERTANIAN		
1	Kepala Pusat Pepustakaan dan Literasi Pertanian	Setjen	15

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Bagian Umum	Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Setjen	12
A.11.	PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN		
1	Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Setjen	15
2	Kepala Bagian Umum	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Setjen	12
A.12.	MUSEUM TANAH DAN PERTANIAN		
1	Kepala Museum Tanah dan Pertanian	Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Setjen	10
B.	**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**		
1	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP)	17
B.1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL		
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Ditjen PSP	15
2	Kepala Bagian Umum	Setditjen PSP	12
B.2.	DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN		
1	Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan	Ditjen PSP	15

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit PPL, Ditjen PSP	9
B.3.	DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN		
1	Direktur Irigasi Pertanian	Ditjen PSP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Irigasi, Ditjen PSP	9
B.4.	DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN		
1	Direktur Pembiayaan Pertanian	Ditjen PSP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Pembiayaan, Ditjen PSP	9
B.5.	DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA		
1	Direktur Pupuk dan Pestisida	Ditjen PSP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Pukpes, Ditjen PSP	9
B.6.	DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN		
1	Direktur Alat dan Mesin Pertanian	Ditjen PSP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit. Alsintan, Ditjen PSP	9
C.	**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**		
1	Direktur Jenderal Tanaman Pangan	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP)	17

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
C.1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN		
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Ditjen TP	15
2	Kepala Bagian Umum	Setditjen TP	12
C.2.	DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN		
1	Direktur Perbenihan Tanaman Pangan	Ditjen TP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Benih TP, Ditjen TP	9
C.3.	DIREKTORAT SEREALIA		
1	Direktur Serealia	Ditjen TP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Serealia, Ditjen TP	9
C.4.	DIREKTORAT ANEKA KACANG DAN UMBI		
1	Direktur Aneka Kacang dan Umbi	Ditjen TP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Akabi, Ditjen TP	9
C.5.	DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN		
1	Direktur Perlindungan Tanaman Pangan	Ditjen TP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ditlin TP, Ditjen TP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
C.6.	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN		
1	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Ditjen TP	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit PPHTP, Ditjen TP	9
C.7.	BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN		
1	Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Ditjen TP	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPOPT, Ditjen TP	11
C.8.	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
1	Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ditjen TP	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPPMBTPH, Ditjen TP	11
C.9.	BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN		
1	Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman	Ditjen TP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPMPT, Ditjen TP	9
D.	**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**		
1	Direktur Jenderal Hortikultura	Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Horti)	17

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
D.1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA		
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura	Ditjen Horti	15
2	Kepala Bagian Umum	Setditjen Horti	12
D.2.	DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA		
1	Direktur Perbenihan Hortikultura	Ditjen Horti	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Benih Horti, Ditjen Horti	9
D.3.	DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA		
1	Direktur Buah dan Florikultura	Ditjen Horti	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Buah, Ditjen Horti	9
D.4.	DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT		
1	Direktur Sayuran dan Tanaman Obat	Ditjen Horti	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit STO, Ditjen Horti	9
D.5.	DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA		
1	Direktur Perlindungan Hortikultura	Ditjen Horti	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ditlin Horti, Ditjen Horti	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
D.6.	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA		
1	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Ditjen Horti	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit PPH Horti, Ditjen Horti	9
E.	**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**		
1	Direktur Jenderal Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun)	17
E.1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN		
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan	Ditjenbun	15
2	Kepala Bagian Umum	Setditjenbun	12
E.2.	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN		
1	Direktur Perbenihan Perkebunan	Ditjenbun	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Benihbun, Ditjenbun	9
E.3.	DIREKTORAT TANAMAN KELAPA SAWIT DAN ANEKA PALMA		
1	Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Ditjenbun	15

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjenbun	9
E.4.	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN TAHUNAN		
1	Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan	Ditjenbun	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Tanaman Semusim dan Tahunan, Ditjenbun	9
E.5.	DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN		
1	Direktur Perlindungan Perkebunan	Ditjenbun	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ditlinbun, Ditjenbun	9
E.6.	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN		
1	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Ditjenbun	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit PPHbun, Ditjenbun	9
E.7.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA		
1	Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	Ditjenbun	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPPTP Surabaya, Ditjenbun	11

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
E.8.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN		
1	Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	Ditjenbun	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPPTP Medan, Ditjenbun	11
E.9.	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON		
1	Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Ditjenbun	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPPTP Ambon, Ditjenbun	11
E.10.	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK		
1	Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	Ditjenbun	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPTP Pontianak, Ditjenbun	9
F.	**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**		
1	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)	17
F.1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ditjen PKH	15

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Bagian Umum	Setditjen PKH	12
F.2.	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK		
1	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	Ditjen PKH	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Bibit, Ditjen PKH	9
F.3.	DIREKTORAT PAKAN		
1	Direktur Pakan	Ditjen PKH	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Pakan, Ditjen PKH	9
F.4.	DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN		
1	Direktur Kesehatan Hewan	Ditjen PKH	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Keswan, Ditjen PKH	9
F.5.	DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
1	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ditjen PKH	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit Kesmavet, Ditjen PKH	9
F.6.	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN		
1	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Ditjen PKH	15

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dit PPHnak, Ditjen PKH	9
F.7.	BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA		
1	Kepala Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA	Ditjen PKH	14
2	Kepala Bagian Umum	BBVF PUSVETMA, Ditjen PKH	11
F.8.	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN		
1	Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Ditjen PKH	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPMSOH, Ditjen PKH	11
F.9.	BALAI BESAR VETERINER WATES		
1	Kepala Balai Besar Veteriner Wates	Ditjen PKH	14
2	Kepala Bagian Umum	BB-Vet Wates, Ditjen PKH	11
F.10.	BALAI BESAR VETERINER DENPASAR		
1	Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar	Ditjen PKH	14
2	Kepala Bagian Umum	BB-Vet Denpasar, Ditjen PKH	11
F.11.	BALAI BESAR VETERINER MAROS		
1	Kepala Balai Besar Veteriner Maros	Ditjen PKH	14
2	Kepala Bagian Umum	BB-Vet Maros, Ditjen PKH	11

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
F.12.	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN		
1	Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan	Ditjen PKH	14
2	Kepala Bagian Umum	BBIB, Ditjen PKH	11
F.13.	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN		
1	Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	Ditjen PKH	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPTU-HPT Baturraden, Ditjen PKH	11
F.14.	BALAI INSEMINASI BUATAN		
1	Kepala Balai Inseminasi Buatan	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BIB, Ditjen PKH	9
F.15.	BALAI EMBRIO TERNAK		
1	Kepala Balai Embrio Ternak	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BET, Ditjen PKH	9
F.16.	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN		
1	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	Ditjen PKH	13

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPMSPH, Ditjen PKH	9
F.17.	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN		
1	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPMSP, Ditjen PKH	9
F.18.	BALAI VETERINER MEDAN		
1	Kepala Balai Veteriner Medan	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	B-Vet Medan, Ditjen PKH	9
F.19.	BALAI VETERINER BUKITTINGGI		
1	Kepala Balai Veteriner Bukittinggi	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	B-Vet Bukittinggi, Ditjen PKH.	9
F.20.	BALAI VETERINER LAMPUNG		
1	Kepala Balai Veteriner Lampung	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	B-Vet Lampung, Ditjen PKH	9
F.21.	BALAI VETERINER BANJARBARU		
1	Kepala Balai Veteriner Banjarbaru	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	B-Vet Banjarbaru, Ditjen PKH	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
F.22.	BALAI VETERINER SUBANG		
1	Kepala Balai Veteriner Subang	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	B-Vet Subang, Ditjen PKH	9
F.23.	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI		
1	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPTUHPT Indrapuri, Ditjen PKH	9
F.24.	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG		
1	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPTU-HPT Siborongborong, Ditjen PKH	9
F.25.	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MANGATAS		
1	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPTU-HPT Padang Mangatas, Ditjen PKH	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
F.26.	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA		
1	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPTU-HPT Sembawa, Ditjen PKH	9
F.27.	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI		
1	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPTU-HPT Pelaihari, Ditjen PKH	9
F.28.	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR		
1	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	Ditjen PKH	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPTU-HPT Denpasar, Ditjen PKH	9
F.29.	LOKA VETERINER JAYAPURA		
1	Kepala Loka Veteriner Jayapura	Ditjen PKH	10
G.	**INSPEKTORAT JENDERAL**		
1	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal (Itjen)	17

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
G.1.	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL		
1	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Itjen	15
2	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Inspektorat Jenderal	12
G.2.	INSPEKTORAT I		
1	Inspektur I	Itjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat I, Itjen	9
G.3.	INSPEKTORAT II		
1	Inspektur II	Itjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat II, Itjen	9
G.4.	INSPEKTORAT III		
1	Inspektur III	Itjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat III, Itjen	9
G.5.	INSPEKTORAT IV		
1	Inspektur IV	Itjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat IV, Itjen	9
G.6.	INSPEKTORAT INVESTIGASI		
1	Inspektur Investigasi	Itjen	15
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat Investigasi, Itjen	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.	**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**		
1	Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)	17
H.1.	SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN		
1	Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	BSIP	15
2	Kepala Bagian Umum	Setba BSIP	12
H.2.	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN		
1	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	BSIP	15
2	Kepala Bagian Tata Usaha	PSI Tanaman Pangan, BSIP	12
H.3.	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA		
1	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	BSIP	15
2	Kepala Bagian Tata Usaha	PSI Hortikultura, BSIP	12
H.4.	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN		
1	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	BSIP	15
2	Kepala Bagian Tata Usaha	PSI Perkebunan, BSIP	12

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.5.	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
1	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan	BSIP	15
2	Kepala Bagian Tata Usaha	PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan, BSIP	12
H.6.	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI		
1	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	BSIP	14
2	Kepala Bagian Tata Usaha	BBPSI Padi, BSIP	11
H.7.	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER		
1	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	BSIP	14
2	Kepala Bagian Tata Usaha	BBPSI Veteriner, BSIP	11
H.8.	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN		
1	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	BSIP	14
2	Kepala Bagian Tata Usaha	BBPSI SDLP, BSIP	11
H.9.	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN		
1	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	BSIP	14
2	Kepala Bagian Tata Usaha	BBPSI Mektan, BSIP	11

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.10.	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN		
1	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	BSIP	14
2	Kepala Bagian Tata Usaha	BBPSI Pascapanen Pertanian, BSIP	11
H.11.	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN		
1	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	BSIP	14
2	Kepala Bagian Tata Usaha	BBPSI Biogen, BSIP	11
H.12.	BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN		
1	Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	BSIP	14
2	Kepala Bagian Tata Usaha	BBPSIP, BSIP	11
H.13.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Aneka Kacang, BSIP	9
H.14.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	BSIP	13

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Serealia, BSIP	9
H.15.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SAYURAN		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Sayuran, BSIP	9
H.16.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN BUAH TROPIKA		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Buah Tropika, BSIP	9
H.17.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Hias, BSIP	9
H.18.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	BSIP	13

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, BSIP	9
H.19.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, BSIP	9
H.20.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Industri dan Penyegar, BSIP	9
H.21.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Pemanis dan Serat, BSIP	9
H.22.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	BSIP	13

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanaman Palma, BSIP	9
H.23.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Unggas dan Aneka Ternak, BSIP	9
H.24.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Aceh, BSIP	9
H.25.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Sumatera Utara, BSIP	9
H.26.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Sumatera Barat, BSIP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.27.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Riau, BSIP	9
H.28.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Jambi, BSIP	9
H.29.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Sumatera Selatan, BSIP	9
H.30.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BENGKULU		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Bengkulu, BSIP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.31.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Lampung, BSIP	9
H.32.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Kepulauan Bangka Belitung, BSIP	9
H.33.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Kepulauan Riau, BSIP	9
H.34.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP DKI Jakarta, BSIP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.35.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Jawa Barat, BSIP	9
H.36.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Jawa Tengah, BSIP	9
H.37.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN D.I YOGYAKARTA		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian D.I Yogyakarta	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP D.I Yogyakarta, BSIP	9
H.38.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Jawa Timur, BSIP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.39.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Banten, BSIP	9
H.40.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Bali, BSIP	9
H.41.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Nusa Tenggara Barat, BSIP	9
H.42.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Nusa Tenggara Timur, BSIP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.43.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Kalimantan Barat, BSIP	9
H.44.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Kalimantan Tengah, BSIP	9
H.45.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Kalimantan Selatan, BSIP	9
H.46.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Kalimantan Timur, BSIP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.47.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Sulawesi Utara, BSIP	9
H.48.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Sulawesi Tengah, BSIP	9
H.49.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Sulawesi Selatan, BSIP	9
H.50.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Sulawesi Tenggara, BSIP	9
H.51.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	BSIP	13

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Gorontalo, BSIP	9
H.52.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Sulawesi Barat, BSIP	9
H.53.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Maluku, BSIP	9
H.54.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Maluku Utara, BSIP	9
H.55.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Papua Barat, BSIP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
H.56.	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA		
1	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSIP Papua, BSIP	9
H.57.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Tanah dan Pupuk, BSIP	9
H.58.	BALAI PENNGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Lingkungan Pertanian, BSIP	9
H.59.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Pertanian Lahan Rawa, BSIP	9
H.60.	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN		
1	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	BSIP	13

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, BSIP	9
H.61.	BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN		
1	Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	BSIP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BISIP, BSIP	9
H.62.	LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI		
1	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	BSIP	10
H.63.	LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR		
1	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	BSIP	10
H.64.	LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL		
1	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	BSIP	10
I.	**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**		
1	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)	17

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
I.1.	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN		
1	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	BPPSDMP	15
2	Kepala Bagian Umum	Setba PPSDMP	12
I.2.	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN		
1	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	BPPSDMP	15
I.3.	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN		
1	Kepala Pusat Pendidikan Pertanian	BPPSDMP	15
I.4.	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN		
1	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian	BPPSDMP	15
I.5.	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN		
1	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	BPPSDMP	15
2	Kepala Bagian Umum	Polbangtan Medan, BPPSDMP	12
I.6.	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR		
1	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	BPPSDMP	15
2	Kepala Bagian Umum	Polbangtan Bogor, BPPSDMP	12

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
I.7.	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA - MAGELANG		
1	Direktur Polbangtan Magelang	BPPSDMP	15
2	Kepala Bagian Umum	Polbangtan Yogyakarta - Magelang, BPPSDMP	12
I.8.	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG		
1	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	BPPSDMP	15
2	Kepala Bagian Umum	Polbangtan Malang, BPPSDMP	12
I.9.	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN GOWA		
1	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	BPPSDMP	15
2	Kepala Bagian Umum	Polbangtan Gowa, BPPSDMP	12
I.10.	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI		
1	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	BPPSDMP	15
2	Kepala Bagian Umum	Polbangtan Manokwari, BPPSDMP	12
I.11.	POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA		
1	Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	BPPSDMP	13
2	Kepala Subbagian Umum	PEPI, BPPSDMP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
I.12.	SMK-PPN SEMBAWA		
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	SMK-PPN Sembawa, BPPSDMP	9
I.13.	SMK-PPN BANJARBARU		
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	SMK-PPN Banjarbaru, BPPSDMP	9
I.14.	SMK-PPN KUPANG		
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	SMK-PPN Kupang, BPPSDMP	9
I.15.	BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN		
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	BPPSDMP	15
2	Kepala Bagian Umum	BBPMKP, BPPSDMP	12
I.16.	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG		
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	BPPSDMP	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPP Lembang, BPPSDMP	11
I.17.	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG		
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	BPPSDMP	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPP Binuang, BPPSDMP	11
I.18.	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN		
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	BPPSDMP	14

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Bagian Umum	BBPP Ketindan, BPPSDMP	11
I.19.	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU		
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	BPPSDMP	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPP Batangkaluku, BPPSDMP	11
I.20.	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG		
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	BPPSDMP	14
2	Kepala Bagian Umum	BBP Ternak Kupang, BPPSDMP	11
I.21.	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU		
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	BPPSDMP	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPP Batu, BPPSDMP	11
I.22.	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA		
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	BPPSDMP	14
2	Kepala Bagian Umum	BBPKH Cinagara, BPPSDMP	11
I.23.	BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI		
1	Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi	BPPSDMP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Bapeltan Jambi, BPPSDMP	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
I.24.	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG		
1	Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung	BPPSDMP	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Bapeltan Lampung, BPPSDMP	9
J.	**BADAN KARANTINA PERTANIAN**		
1	Kepala Badan Karantina Pertanian	Badan Karantina Pertanian (Barantan)	17
J.1.	SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN		
1	Sekretaris Badan Karantina Pertanian	Barantan	15
2	Kepala Bagian Umum	Setbarantan	12
J.2.	PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI		
1	Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Barantan	15
J.3.	PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI		
1	Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Barantan	15
J.4.	PUSAT KEPATUHAN, KERJA SAMA, DAN INFORMASI PERKARANTINAAN		
1	Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan	Barantan	15

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
J.5.	BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN		
1	Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	Barantan	14
2	Kepala Bagian Umum	BBUSKP, Barantan	11
J.6.	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA		
1	Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	Barantan	14
2	Kepala Bagian Umum	BBKP Surabaya, Barantan	11
J.7.	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK		
1	Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	Barantan	14
2	Kepala Bagian Umum	BBKP Tanjung Priok, Barantan	11
J.8.	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA		
1	Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta	Barantan	14
2	Kepala Bagian Umum	BBKP Soekarno Hatta, Barantan	11
J.9.	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN BELAWAN		
1	Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Barantan	14
2	Kepala Bagian Umum	BBKP Belawan, Barantan	11

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
J.10.	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR		
1	Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	Barantan	14
2	Kepala Bagian Umum	BBKP Makassar, Barantan	11
J.11.	BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN		
1	Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BUTTMKP, Barantan	9
J.12.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Denpasar, Barantan	9
J.13.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Semarang, Barantan	9
J.14.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BALIKPAPAN		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	Barantan	13

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Balikpapan, Barantan	9
J.15.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Bandar Lampung, Barantan	9
J.16.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Pekanbaru, Barantan	9
J.17.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Pontianak, Barantan	9
J.18.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Kupang, Barantan	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
J.19.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Banjarmasin, Barantan	9
J.20.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Mataram, Barantan	9
J.21.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MANADO		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Manado, Barantan	9
J.22.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Padang, Barantan	9
J.23.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Jayapura, Barantan	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
J.24.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PALEMBANG		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Palembang, Barantan	9
J.25.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Jambi, Barantan	9
J.26.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	Barantan	13
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP I Batam, Barantan	9
J.27.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Medan, Barantan	8
J.28.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNG PINANG		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang	Barantan	12

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Tanjung Pinang, Barantan	8
J.29.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Ternate, Barantan	8
J.30.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KENDARI		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Kendari, Barantan	8
J.31.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKAL PINANG		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Pangkal Pinang, Barantan	8
J.32.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Tarakan, Barantan	8
J.33.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	Barantan	12

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Cilegon, Barantan	8
J.34.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II YOGYAKARTA		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Yogyakarta, Barantan	8
J.35.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Palangkaraya, Barantan	8
J.36.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Palu, Barantan	8
J.37.	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO		
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	Barantan	12
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	BKP II Gorontalo, Barantan	8
J.38.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BIAK		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak	Barantan	10

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
J.39.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong	Barantan	10
J.40.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TANJUNG BALAI ASAHAN		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan	Barantan	10
J.41.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I CILACAP		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Barantan	10
J.42.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	Barantan	10
J.43.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDA ACEH		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh	Barantan	10
J.44.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong	Barantan	10
J.45.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SAMARINDA		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda	Barantan	10

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
J.46.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I AMBON		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon	Barantan	10
J.47.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BENGKULU		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu	Barantan	10
J.48.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TIMIKA		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika	Barantan	10
J.49.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I MERAUKE		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke	Barantan	10
J.50.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung	Barantan	10
J.51.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I PARE-PARE		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-pare	Barantan	10
J.52.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun	Barantan	9

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
J.53.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II ENDE		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	Barantan	9
J.54.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MAMUJU		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju	Barantan	9
J.55.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MANOKWARI		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari	Barantan	9
J.56.	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN		
1	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	Barantan	9

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/KPTS/KP.010/M/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : NAMA DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
A.	**BIDANG PERTANIAN**	
I.	ANALIS KETAHANAN PANGAN	
1	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10
2	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8
II.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	
1	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	11
2	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	9
3	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
III.	ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN	
1	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama	14
2	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya	12
3	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	10
4	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama	8
IV.	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	
1	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya	12
2	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	10
3	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	8
V.	DOKTER HEWAN KARANTINA	
1	Dokter Hewan Karantina Ahli Utama	14
2	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	12
3	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
4	Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama	8
VI.	MEDIK VETERINER	
1	Medik Veteriner Ahli Utama	13
2	Medik Veteriner Ahli Madya	11
3	Medik Veteriner Ahli Muda	9
4	Medik Veteriner Ahli Pertama	8
VII.	PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	
1	Paramedik Karantina Hewan Penyelia	9
2	Paramedik Karantina Hewan Mahir	8
3	Paramedik Karantina Hewan Terampil	7
4	Paramedik Karantina Hewan Pemula	6
VIII.	PARAMEDIK VETERINER	
1	Paramedik Veteriner Penyelia	8
2	Paramedik Veteriner Mahir	7
3	Paramedik Veteriner Terampil	6
4	Paramedik Veteriner Pemula	5
IX.	PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	
1	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia	9
2	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir	8
3	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	7
4	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula	6
X.	PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	
1	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Madya	11
2	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Muda	9
3	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
XI.	PENGAWAS ALAT MESIN PERTANIAN	
1	Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Madya	12
2	Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Muda	10
3	Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Pertama	8
XII.	PENGAWAS BENIH TANAMAN	
1	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	11
2	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9
3	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	8
4	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	8
5	Pengawas Benih Tanaman Mahir	7
6	Pengawas Benih Tanaman Terampil	6
7	Pengawas Benih Tanaman Pemula	5
XIII.	PENGAWAS BIBIT TERNAK	
1	Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya	11
2	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9
3	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8
4	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	8
5	Pengawas Bibit Ternak Mahir	7
6	Pengawas Bibit Ternak Terampil	6
XIV.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	
1	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mahir	7
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	6
7	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula	5
XV.	PENGAWAS MUTU PAKAN	
1	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	11

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
2	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	9
3	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	8
4	Pengawas Mutu Pakan Penyelia	8
5	Pengawas Mutu Pakan Mahir	7
6	Pengawas Mutu Pakan Terampil	6
7	Pengawas Mutu Pakan Pemula	5
XVI.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	
1	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya	11
2	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	9
3	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	8
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	8
5	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir	7
6	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	6
7	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	5
XVII.	PENYULUH PERTANIAN	
1	Penyuluh Pertanian Ahli Utama	13
2	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	11
3	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9
4	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8
B.	**NON BIDANG PERTANIAN**	
I.	ANALIS ANGGARAN	
1	Analis Anggaran Ahli Madya	12
2	Analis Anggaran Ahli Muda	10
3	Analis Anggaran Ahli Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
II.	ANALIS HUKUM	
1	Analis Hukum Ahli Madya	11
2	Analis Hukum Ahli Muda	9
3	Analis Hukum Ahli Pertama	8
III.	ANALIS KEBIJAKAN	
1	Analis Kebijakan Ahli Utama	14
2	Analis Kebijakan Ahli Madya	12
3	Analis Kebijakan Ahli Muda	10
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8
IV.	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK	
1	Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11
V.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	
1	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
2	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
VI.	ANALIS STANDARDISASI	
1	Analis Standardisasi Ahli Utama	13
2	Analis Standardisasi Ahli Madya	11
3	Analis Standardisasi Ahli Muda	9
4	Analis Standardisasi Ahli Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
VII.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
1	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
2	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
3	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
VIII.	APOTEKER	
1	Apoteker Ahli Muda	9
2	Apoteker Ahli Pertama	8
IX.	ARSIPARIS	
1	Arsiparis Ahli Madya	11
2	Arsiparis Ahli Muda	9
3	Arsiparis Ahli Pertama	8
4	Arsiparis Penyelia	8
5	Arsiparis Mahir	7
6	Arsiparis Terampil	6
X.	ASESOR SDM APARATUR	
1	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
2	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
3	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
XI.	ASISTEN APOTEKER	
1	Asisten Apoteker Penyelia	8
2	Asisten Apoteker Mahir	7
3	Asisten Apoteker Terampil	6
XII.	AUDITOR	
1	Auditor Ahli Utama	14

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
2	Auditor Ahli Madya	12
3	Auditor Ahli Muda	10
4	Auditor Ahli Pertama	8
5	Auditor Terampil	6
XIII.	DOKTER GIGI	
1	Dokter Gigi Ahli Madya	11
2	Dokter Gigi Ahli Muda	10
3	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
XIV.	DOKTER UMUM	
1	Dokter Umum Ahli Madya	11
2	Dokter Umum Ahli Muda	10
3	Dokter Umum Ahli Pertama	9
XV.	GURU	
1	Guru Ahli Utama	13
2	Guru Ahli Madya	11
3	Guru Ahli Muda	9
4	Guru Ahli Pertama	8
XVI.	DOSEN	
1	Guru Besar	15
2	Lektor Kepala	13
3	Lektor	12
4	Asisten Ahli	9
XVII.	PAMONG BUDAYA	
1	Pamong Budaya Ahli Muda	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
2	Pamong Budaya Ahli Pertama	8
XVIII.	PENERJEMAH	
1	Penerjemah Ahli Madya	11
2	Penerjemah Ahli Muda	9
3	Penerjemah Ahli Pertama	8
XIX.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
XX.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	
1	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
2	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
3	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
XXI.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14
2	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12
3	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10
4	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
XXII.	PERAWAT GIGI	
1	Perawat Gigi Penyelia	8
2	Perawat Gigi Mahir	7
3	Perawat Gigi Terampil	6

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
XXIII.	PERAWAT	
1	Perawat Penyelia	8
2	Perawat Mahir	7
3	Perawat Terampil	6
XXIV.	PEREKAYASA	
1	Perekayasa Ahli Utama	13
2	Perekayasa Ahli Madya	11
3	Perekayasa Ahli Muda	9
4	Perekayasa Ahli Pertama	8
XXV.	PERENCANA	
1	Perencana Ahli Utama	14
2	Perencana Ahli Madya	12
3	Perencana Ahli Muda	10
4	Perencana Ahli Pertama	8
XXVI.	PRANATA HUMAS	
1	Pranata Humas Ahli Madya	11
2	Pranata Humas Ahli Muda	9
3	Pranata Humas Ahli Pertama	8
4	Pranata Humas Penyelia	8
5	Pranata Humas Mahir	7
6	Pranata Humas Terampil	6
7	Pranata Humas Pemula	5
XXVII.	PRANATA KEUANGAN APBN	
1	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
2	Pranata Keuangan APBN Mahir	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
3	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
XXVIII.	PRANATA KOMPUTER	
1	Pranata Komputer Ahli Madya	11
2	Pranata Komputer Ahli Muda	9
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
4	Pranata Komputer Penyelia	8
5	Pranata Komputer Mahir	7
6	Pranata Komputer Terampil	6
7	Pranata Komputer Pemula	5
XXIX.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7
3	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
XXX.	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	
1	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7
6	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6
XXXI.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
1	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
2	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
3	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
XXXII.	PUSTAKAWAN	
1	Pustakawan Ahli Utama	13
2	Pustakawan Ahli Madya	11
3	Pustakawan Ahli Muda	9
4	Pustakawan Ahli Pertama	8
5	Pustakawan Penyelia	8
6	Pustakawan Mahir	7
7	Pustakawan Terampil	6
XXXIII.	STATISTISI	
1	Statistisi Ahli Utama	13
2	Statistisi Ahli Madya	11
3	Statistisi Ahli Muda	9
4	Statistisi Ahli Pertama	8
5	Statistisi Penyelia	8
6	Statistisi Mahir	7
7	Statistisi Terampil	6
8	Statistisi Pemula	5
XXXIV.	TEKNISI LITKAYASA	
1	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
2	Teknisi Litkayasa Mahir	7
3	Teknisi Litkayasa Terampil	6
4	Teknisi Litkayasa Pemula	5

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
XXXV.	WIDYAISWARA	
1	Widyaiswara Ahli Utama	14
2	Widyaiswara Ahli Madya	12
3	Widyaiswara Ahli Muda	10
4	Widyaiswara Ahli Pertama	8

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/KPTS/KP.010/M/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : NAMA DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

NAMA DAN KELAS JABATAN PELAKSANA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Klasifikasi Jabatan	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kelas Jabatan
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	Klerek	S-1 / D-4	7
2.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Klerek	S-1 / D-4	7
3.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Klerek	S-1 / D-4	7
4.	Penata Layanan Operasional	Operator	S-1 / D-4	7
5.	Pengolah Data dan Informasi	Klerek	D-3	6
6.	Dokumentalis Hukum	Klerek	D-3	6
7.	Pengelola Keprotokolan	Klerek	D-3	6
8.	Operator Laboratorium	Operator	D-3	6
9.	Pengelola Layanan Operasional	Operator	D-3	6
10.	Pengadministrasi Perkantoran	Klerek	SLTA Sederajat	5
11.	Operator Layanan Operasional	Operator	SLTA Sederajat	5

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN